

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

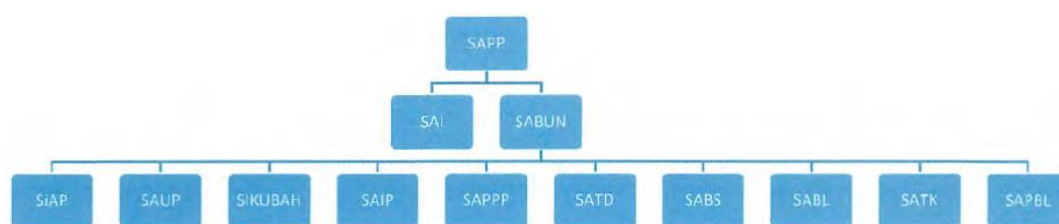
#### **2.1 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat**

Sebagaimana dicantumkan dalam PMK No. 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi dan operasi keuangan pada Pemerintah Pusat dalam rangka menghasilkan LKPP. Fungsi akuntansi tersebut dimulai sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan. Demi mengakomodir kebutuhan atas kemajuan zaman, SAPP terus dikembangkan sesuai dengan SAP dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Ketentuan mengenai SAPP sebelumnya telah diatur pada PMK No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Kemudian, dicabut dengan PMK No. 217/PMK.05/2022.

Penyelenggaraan SAPP merupakan salah satu bentuk realisasi dari amanat UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa diperlukan suatu Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kerangka umum SAPP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dibagi menjadi dua sistem, yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI). Berikut adalah gambar mengenai kerangka umum dan struktur SAPP.

Gambar II.1 Kerangka Umum SAPP



Sumber: PMK No. 217/PMK.05/2022

SABUN adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan Pengguna Anggaran (PA) Bagian Anggaran (BA) BUN. SABUN digunakan untuk memproses transaksi keuangan dan/atau transaksi barang yang dikelola oleh BUN. SABUN terdiri dari:

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP),
2. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP),
3. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH),
4. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP),
5. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman (SAPPP),
6. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah (SATD),

7. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SABS),
8. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain (SABL),
9. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SATK), dan
10. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SAPBL).

SiAP digunakan oleh BUN dalam rangka pengelolaan uang negara. Sementara SAUP, SIKUBAH, SAIP, SAPPP, SATD, SABS, SABL, SATK, dan SAPBL, digunakan oleh BUN selaku PA BA BUN dan/atau pengelola transaksi BUN lainnya.

SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pada K/L. Setiap K/L menyelenggarakan SAI secara berjenjang mulai dari tingkat Satker, termasuk Satker Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sampai tingkat K/L. SAI terdiri dari: akuntansi dan pelaporan keuangan, serta akuntansi dan pelaporan BMN. SAI digunakan untuk memproses data transaksi keuangan dan transaksi barang yang difasilitasi oleh suatu sistem aplikasi terintegrasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan dan laporan barang pada K/L. Sistem aplikasi terintegrasi yang dimaksud adalah SAKTI sebagai manifestasi produk dari perkembangan proses bisnis pengelolaan keuangan negara.

## **2.2 Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi**

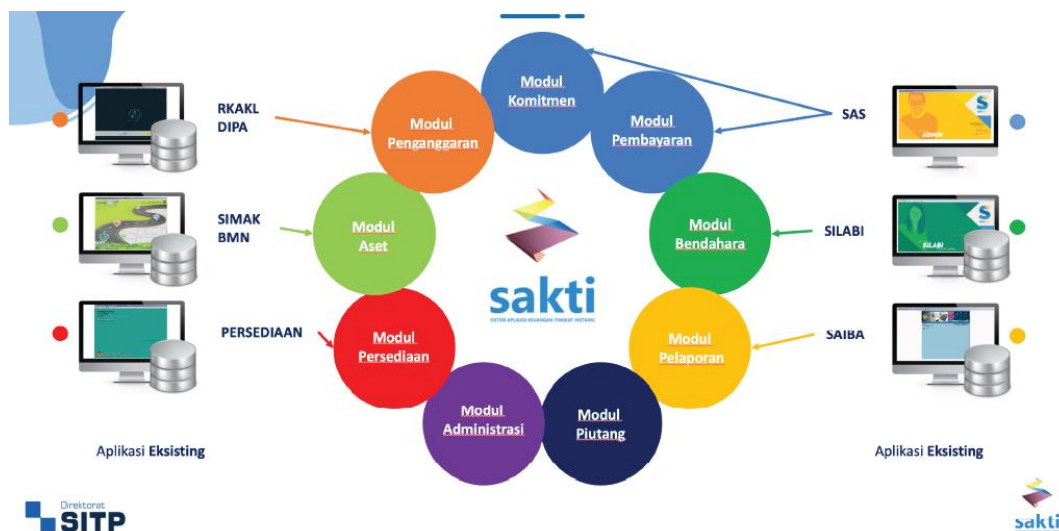
### **2.2.1 Pengertian SAKTI**

Menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, salah satu upaya

konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. PMK No. 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI mengamanatkan bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah penggunaan sistem aplikasi keuangan yang mengintegrasikan siklus pengelolaan keuangan negara melalui dukungan SAKTI. SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada instansi pemerintah.

SAKTI disebut sebagai sistem terintegrasi karena sebelumnya masing-masing fungsi dalam sistem pengelolaan keuangan negara berdiri sendiri. SAKTI hadir untuk mengintegrasikan seluruh aplikasi *existing* ke dalam satu aplikasi melalui modul-modul terintegrasi. Berikut ini merupakan gambar mengenai integrasi aplikasi *existing* menjadi satu aplikasi yaitu SAKTI.

Gambar II.2 Ruang Lingkup SAKTI



Sumber: DJPb Kemenkeu (2019)

Fungsi utama SAKTI yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN. Selain itu, SAKTI ber-*interface* dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Pengintegrasian tersebut serta interkoneksi antara Satker dan KPPN melalui SAKTI dengan SPAN membuat proses pengelolaan keuangan negara menjadi lebih efisien dan efektif.

Proses implementasi SAKTI dilakukan secara bertahap. *Piloting* SAKTI telah dilakukan sejak 2015 yang dibagi menjadi tiga tahap melalui PMK No. 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi sebagaimana telah diubah dua kali dengan PMK No. 131/PMK.05/2016 dan PMK No. 185/PMK.05/2017. Tahap I minimal lima satuan kerja (Satker) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi DKI Jakarta. Tahap II untuk Satker DJPb di seluruh Indonesia. Tahap III untuk seluruh Satker

Kemenkeu. PMK tersebut kemudian dicabut dengan PMK No. 159/PMK.05/2018 yang mengamanatkan *piloting* SAKTI dilakukan pada seluruh Satker Kemenkeu dan beberapa Satker Kementerian dan Lembaga (K/L) dengan batas waktu maksimal Desember 2018. Tahapan *piloting* SAKTI dilanjutkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 957/KMK.05/2019 tentang Pelaksanaan *Piloting* SAKTI Tahap IV dan KMK No. 537/KMK.05/2019 tentang Pelaksanaan *Piloting* SAKTI Tahap V. Pada mulanya, SAKTI masih *desktop-based* hingga mulai 2019 sampai dengan 2020 secara bertahap bertransformasi menjadi *web-based* dengan sebutan SAKTI *web full module* (Satriyawan, 2020). PMK No. 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI menginstruksikan bahwa *roll out* SAKTI dilaksanakan mulai tahun anggaran 2022.

### 2.2.2 Ruang Lingkup Implementasi SAKTI

PMK No. 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI menginstruksikan bahwa penyelenggaraan SAKTI digunakan untuk proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban APBN mulai tahun anggaran 2022. Implementasi SAKTI tersebut atau biasa disebut dengan *roll out* SAKTI *web full module* mencakup keseluruhan (sembilan) modul yang ada pada SAKTI sebagai sebuah sistem terintegrasi. Adapun modul-modul SAKTI adalah sebagai berikut.

#### a. Modul Administrasi

Modul ini merupakan bagian dari SAKTI yang berfungsi untuk mengelola

data referensi dan data *user* SAKTI.

b. Modul Penganggaran

Modul ini berfungsi untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sampai dengan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran termasuk mencakup proses perencanaan penyerapan anggaran dan penerimaan/pendapatan dalam periode satu tahun anggaran.

c. Modul Komitmen

Modul ini berfungsi untuk pengelolaan aktivitas terkait pencatatan data *supplier*, kontrak, dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dalam rangka pelaksanaan APBN untuk mendukung pengelolaan data pagu, perencanaan kas, dan referensi dalam pelaksanaan pembayaran.

d. Modul Bendahara

Modul ini berfungsi untuk penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui bendahara.

e. Modul Pembayaran

Modul ini berfungsi untuk pengajuan pembayaran atas beban APBN, pengesahan pendapatan dan belanja, dan pencatatan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

f. Modul Persediaan

Modul ini berfungsi untuk penatausahaan, pengakuntansian, dan pelaporan barang persediaan.

g. Modul Aset Tetap

Modul ini berfungsi untuk penatausahaan, pengakuntansian, serta pelaporan

BMN berupa aset tetap dan Aset Tak Berwujud (ATB).

h. Modul Piutang

Modul ini berfungsi untuk melakukan penatausahaan dan pengakuntansian piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

i. Modul Akuntansi dan Pelaporan

Modul ini berfungsi untuk mengintegrasikan data jurnal dari semua modul SAKTI dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

Pelaksanaan SAKTI didukung dengan aplikasi yang berfungsi untuk *monitoring* data dan transaksi SAKTI. Cakupan proses *monitoring* tersebut meliputi *monitoring* realisasi anggaran, data *supplier*, data kontrak, status tagihan, dan indikator kesesuaian data pelaporan.

### 2.2.3 Tujuan dan Manfaat SAKTI

Kehadiran SAKTI bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan negara mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN guna mewujudkan tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Tujuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi pada laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan oleh SAKTI.

Implementasi SAKTI secara penuh di semua K/L dipercaya akan memberikan manfaat bukan hanya bagi pengguna SAKTI melainkan juga bagi *stakeholders* melalui peningkatan layanan dan penyempurnaan penerapan *good governance* sektor publik. Adapun manfaat dari penggunaan SAKTI sebagaimana disebutkan

oleh Handoko (2022) adalah sebagai berikut.

- a. Hanya dengan satu aplikasi sudah mencakup satu siklus pengelolaan keuangan negara sehingga operasional pengelolaan keuangan negara menjadi lebih mudah dan efektif.
- b. Simplikasi proses bisnis yang ada pada SAKTI bermanfaat bagi efisiensi sumber daya baik keuangan maupun non-keuangan seperti efisiensi waktu operasionalisasi.
- c. Di antara keunggulan SAKTI adalah *database* terpusat dan perekaman data transaksi bersifat *real time* sehingga dalam proses konsolidasi data APBN untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah menjadi lebih cepat.
- d. Sebagai sebuah sistem terintegrasi dengan memperhatikan pengendalian sistem berupa pemisahan kewenangan antar *user*, dan penggunaan akuntansi berbasis akrual, SAKTI dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan SAP dengan memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

#### **2.2.4 Prinsip Dasar SAKTI**

PMK No. 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI menyebutkan beberapa prinsip dasar SAKTI ke dalam beberapa pasal. Adapun beberapa prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) SAKTI digunakan oleh:
  - a. BA K/L,
  - b. BA BUN yang mempunyai hak akses pengguna,

- c. BUN, dan
  - d. unit lain yang diberikan hak akses pengguna.
- 2) Transaksi pada SAKTI dilakukan secara sistem elektronik.
  - 3) SAKTI menggunakan *database* terpusat, *multi user*, dan multi Satker.
  - 4) Hak akses SAKTI hanya diberikan kepada pengguna sesuai dengan kewenangannya.
  - 5) Terhadap pengiriman data antar modul pada SAKTI dan/atau dari SAKTI ke SPAN dilakukan pengamanan secara elektronik dalam bentuk tanda tangan elektronik berupa *one-time password*, *biometric*, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 6) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggung jawab atas pelaksanaan operasionalisasi SAKTI pada Satker.
  - 7) Periodisasi transaksi yang digunakan pada SAKTI meliputi:
    - a. periode Januari sampai dengan Desember, untuk transaksi sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan *unaudited* dengan tanggal buku sesuai dengan transaksi yang dimaksud,
    - b. periode 13 dan periode 14, untuk transaksi Laporan Keuangan *audited* dengan tanggal buku 31 Desember.
  - 8) Tutup buku transaksi pada SAKTI merupakan proses tutup buku saat periode transaksi dinyatakan berakhir.
  - 9) Jika terdapat transaksi yang belum dicatat setelah dilakukan tutup buku, transaksi tersebut dicatat pada periode berikutnya.

### 2.2.5 Tata Cara Pelaksanaan SAKTI

Tata cara pelaksanaan SAKTI diatur dalam BAB II PMK No. 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI. Tata cara tersebut terbagi ke dalam dua belas bagian. Pada bagian pertama, dipaparkan mengenai pengelolaan infrastruktur dan jaringan. Unit pengelola infrastruktur dan jaringan terdiri atas unit pada Kemenkeu selaku Penyelenggara Sistem dan K/L selaku Pengguna. Kemenkeu bertanggung jawab terhadap penyediaan layanan infrastruktur dan jaringan pada *data center* Kemenkeu. Sementara K/L bertanggung jawab terhadap pengelolaan infrastruktur dan jaringan pada lingkungan K/L.

Bagian kedua hingga kesepuluh menjelaskan tentang proses bisnis masing-masing modul yang ada pada SAKTI. Proses bisnis dari sembilan modul yang ada pada SAKTI adalah sebagai berikut.

#### 1. Modul Administrasi

Fitur-fitur pada Modul Administrasi meliputi: *user management*, *back up/restore* data referensi/data transaksi, *security management*, pengelolaan referensi seluruh modul, dan dokumentasi bantuan. Pengguna SAKTI terdiri dari dua peran, yaitu administrator dan operasional modul. Kemudian, hak akses pengguna operasional modul dibagi menjadi tiga. Ketiga hak akses tersebut adalah sebagai berikut.

##### a. Operator

Operator memiliki kewenangan melakukan aktivitas perekaman data dalam SAKTI.

**b. Validator**

Validator memiliki kewenangan melakukan aktivitas pengujian/penelitian atas perekaman data yang dilakukan oleh operator.

**c. Approver**

*Approver* memiliki kewenangan melakukan aktivitas persetujuan atas perekaman data yang dilakukan oleh operator dan/atau atas perekaman data yang telah disetujui oleh validator.

Kewenangan pengguna operasional modul tersebut tidak dapat dilakukan perangkapan dalam modul yang sama. Pengguna tingkat Satker ditetapkan oleh KPA melalui surat keputusan penetapan pengguna SAKTI.

**2. Modul Penganggaran**

Modul Penganggaran digunakan untuk penyusunan anggaran, penelaahan anggaran, revisi anggaran, dan penyusunan Kerangka Pembangunan Jangka Menengah (KPJM). Fitur-fitur pada Modul Penganggaran meliputi: *budget preparation, management of spending authority*, perencanaan kas, *locking* pagu pada proses revisi anggaran, dan perhitungan pergerakan *Annual Financial Plan* (AFP). *Output* dari modul ini seperti Arsip Data Komputer (ADK) Rencana Kerja Anggaran K/L (RKA-K/L), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan lain-lain.

**3. Modul Komitmen**

Modul Komitmen digunakan untuk pengelolaan data *supplier*, pengelolaan data kontrak, pengelolaan data pelaksanaan kegiatan kontraktual maupun non-kontraktual, dan pengelolaan data capaian *output*. Manajemen *supplier*

merupakan kegiatan mengelola data penerima pembayaran untuk kemudian didaftarkan ke SPAN melalui KPPN. Manajemen kontrak merupakan kegiatan mengelola data kontrak (perikatan dengan pihak ketiga) untuk kemudian didaftarkan ke SPAN melalui KPPN. Pencatatan BAST dilakukan untuk mengakui aset dan utang pada saat serah terima. *Output* dari modul ini seperti ADK *supplier* dan ADK kontrak.

#### 4. Modul Bendahara

Operator pada Modul Bendahara adalah Bendahara Pengeluaran (BP), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), dan Bendahara Penerimaan. Fitur-fitur pada Modul Bendahara meliputi: penatausahaan Langsung (LS) Bendahara, penatausahaan Uang Persediaan (UP)/Tambahan UP (TUP), penatausahaan potongan/pungutan pajak, penatausahaan Surat Bukti Setor (SBS) pendapatan dan/atau pengembalian belanja, dan transaksi lain yang dikelola oleh Bendahara. *Output* dari modul ini seperti Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara.

#### 5. Modul Pembayaran

Modul Pembayaran digunakan untuk penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), pencatatan SP2D, pencatatan Rencana Penarikan Dana (RPD) harian, penerbitan Surat Perintah Bayar (SPBy), koreksi data transaksi, dan penyesuaian pagu DIPA. Penggunaan Modul Pembayaran dilakukan oleh: operator, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku validator, dan Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM)/KPA/kepala kantor selaku *approver* sesuai dengan

kewenangannya masing-masing. *Output* dari modul ini seperti dokumen SPP, dokumen SPM, ADK SPM, dan/atau yang dipersamakan.

#### 6. Modul Persediaan

Modul Persediaan digunakan antara lain untuk kegiatan: perekaman referensi barang persediaan, perekaman transaksi persediaan, tutup buku persediaan, pencetakan laporan persediaan, konfigurasi metode pencatatan, dan konfigurasi metode penilaian. Modul ini menghasilkan beberapa laporan antara lain: buku persediaan, laporan persediaan, dan laporan posisi persediaan di Neraca.

#### 7. Modul Aset Tetap

Modul Aset Tetap digunakan antara lain untuk pemrosesan transaksi: perekaman transaksi BMN, perhitungan penyusutan dan/atau amortisasi, pembuatan *data summary* untuk keperluan pelaporan aset tetap, tutup buku aset tetap, dan pencetakan buku/daftar dan laporan BMN. Pengguna Modul Aset Tetap terdiri atas: operator, validator, dan *approver*. Operator melakukan perekaman transaksi BMN, perhitungan penyusutan dan/atau amortisasi, pembuatan *data summary* untuk keperluan pelaporan aset tetap, dan tutup buku aset tetap. Validator melakukan verifikasi kesesuaian dan validasi terhadap pemrosesan transaksi yang telah dilakukan sebelumnya oleh operator. *Approver* meneliti dan melakukan persetujuan terhadap pemrosesan transaksi yang telah sesuai berdasarkan verifikasi dan validasi yang sebelumnya dilakukan oleh validator. Operator, validator, dan *approver* dapat melakukan pencetakan laporan BMN apabila diperlukan. Modul ini menghasilkan beberapa laporan antara lain: buku/daftar berupa buku barang, daftar transaksi BMN, *history*

BMN, kartu Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), daftar barang rusak berat/hapus yang diusulkan ke pengelola, dan laporan BMN berupa laporan barang, laporan penyusutan, laporan kondisi barang, laporan posisi BMN di Neraca, dan catatan ringkas BMN.

#### 8. Modul Piutang

Modul Piutang digunakan antara lain untuk: perekaman referensi debitur, perekaman transaksi piutang, perekaman *settlement* pembayaran/pelunasan piutang, perekaman surat penagihan, perekaman dokumen reklasifikasi kualitas piutang, perhitungan penyisihan piutang, transfer keluar dan transfer masuk data piutang, perekaman hapus buku/hapus tagih, perekaman koreksi piutang, tutup buku piutang, serta pencetakan laporan piutang. Modul ini menghasilkan beberapa laporan antara lain: kartu piutang, kartu penyisihan piutang tak tertagih, rekapitulasi piutang yang sudah lunas, rekapitulasi transfer keluar dan transfer masuk, serta daftar piutang jatuh tempo.

#### 9. Modul Akuntansi dan Pelaporan

Modul Akuntansi dan Pelaporan digunakan antara lain untuk: jurnal manual dan jurnal penyesuaian, transaksi resiprokal, posting jurnal, *monitoring* jurnal, tutup buku, serta pencetakan laporan keuangan. Ruang lingkupnya yakni sistem akuntansi yang terintegrasi dengan modul-modul lain terkait, sistem pelaporan manajerial (statistik), serta sistem rekonsiliasi dan konsolidasi pelaporan. Penggunaan Modul Akuntansi dan Pelaporan dilaksanakan oleh operator. Modul ini menghasilkan beberapa laporan antara lain: Laporan Buku Besar, Neraca Percobaan, Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Rekonsiliasi Neraca dengan *Sub-Ledger*.

Bagian kesebelas menerangkan tentang aplikasi untuk *monitoring* data dan transaksi SAKTI. Aplikasi tersebut disediakan oleh DJPb dan dinamakan MONSAKTI yang merupakan kependekan dari *Monitoring* SAKTI. MONSAKTI merupakan *tools* yang dapat digunakan oleh pengguna SAKTI untuk pengawasan dan pengendalian intern Satker yang dilakukan oleh Satker, *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan anggaran Satker dan BUN yang dilakukan oleh DJPb selaku BUN dan Satker, serta *monitoring* dan evaluasi sistem aplikasi yang dilakukan oleh DJPb. Cakupan MONSAKTI antara lain: *monitoring* realisasi anggaran, data *supplier*, data kontrak, status tagihan, dan indikator kesesuaian data pelaporan.

Kemudian, bagian duabelas menerangkan mengenai sistem mitra. Kemenkeu dapat bekerja sama dengan K/L dan/atau pihak lain untuk melakukan pertukaran data dengan SAKTI. Untuk melakukan kerja sama tersebut, beberapa persyaratan harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pihak mitra. Pertukaran data yang dimaksud dapat dilakukan melalui interkoneksi dengan SAKTI, dan/atau interkoneksi melalui MONSAKTI.

Pada BAB IV PMK No. 171/PMK.05/2021, ditambahkan penjelasan mengenai dukungan layanan dan keamanan informasi data SAKTI. Kemenkeu melalui DJPb menyediakan layanan pengguna SAKTI bagi seluruh K/L. Layanan tersebut dapat diakses melalui *Help, Answer, Improve* DJPb (HAI-DJPb). Keamanan informasi atas penyelenggaraan sistem elektronik menjadi tanggung jawab Kemenkeu selaku Penyelenggara Sistem. K/L selaku Pengguna

bertanggung jawab atas pemenuhan standar keamanan dan kelancaran jaringan dalam penggunaan SAKTI sesuai dengan kebijakan tata kelola TIK dan standar sistem manajemen keamanan informasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pada BAB V PMK yang sama, ditambahkan *point attention* mengenai migrasi data saldo awal. Migrasi data saldo awal dilaksanakan dalam hal Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, serta Modul Akuntansi dan Pelaporan digunakan untuk pertama kali. Data yang perlu dilakukan migrasi adalah sebagai berikut.

a. Migrasi Data Persediaan

Migrasi data persediaan merupakan proses pemindahan referensi dan saldo awal persediaan dari aplikasi E-Rekon dan LK ke dalam Modul Persediaan.

b. Migrasi Data Aset Tetap

Migrasi data aset tetap merupakan proses pemindahan data aset tetap dari aplikasi E-Rekon dan LK ke dalam Modul Aset Tetap. Migrasi data aset tetap menggunakan data *summary history* BMN.

c. Migrasi Data Buku Besar Neraca

Migrasi data Buku Besar Neraca merupakan proses pemindahan saldo akun Neraca dari aplikasi E-Rekon dan LK ke dalam Modul Akuntansi dan Pelaporan.

Seluruh data yang dilakukan migrasi tersebut merupakan data berdasarkan Laporan Keuangan *audited* tahun sebelumnya. Hasil pelaksanaan migrasi data dituangkan dalam berita acara migrasi data.

## **2.3 Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean**

### **2.3.1 Pengertian Sistem Informasi**

Sistem informasi menurut Fitriani *et al.* (2023) diartikan sebagai satu kesatuan unit dari teknologi informasi termasuk di dalamnya penggunaan teknologi yang merupakan suatu kegiatan untuk mendukung operasionalisasi organisasi dan kebutuhan dalam rangka memenuhi kebutuhan manajerial. Sistem informasi berfungsi sebagai penyedia informasi yang lengkap bagi kebutuhan organisasi karena dengan dukungan teknologi, kebutuhan akan informasi menjadi lebih mudah diakses. Hal ini yang membuat sistem informasi menjelma menjadi salah satu aspek penting sehingga menjadikannya sebagai proyek populer di berbagai bidang organisasi.

Sementara itu, Munir *et al.* (2022) menyebutkan bahwa sistem informasi merupakan kombinasi dari berbagai komponen meliputi: orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan basis data. Berbagai komponen tersebut melakukan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan prosedur tertentu guna menghasilkan dan menyebarkan informasi pada suatu organisasi. Penggunaan sistem informasi melalui dukungan teknologi menjadi salah satu solusi dalam mengatasi suatu permasalahan yang mendorong timbulnya kebutuhan.

Berdasarkan hal tersebut, sistem informasi yang mudah digunakan pada dasarnya dibangun dan terus dikembangkan di atas kebutuhan pengguna. Sistem informasi dengan dukungan teknologi selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi sehingga mampu menjadi sistem berkualitas tinggi yang

memenuhi kriteria yang diharapkan. Oleh sebab itu, kompleksitas sistem informasi harus dihindari karena tidak menjamin kesuksesan sistem informasi tersebut mengingat faktor kemudahan dalam mengakses menjadi poin yang paling banyak diinginkan dan dibutuhkan oleh pengguna. Suatu sistem informasi dapat dikatakan berhasil jika dapat memberikan nilai manfaat bagi pengguna, dalam hal ini adalah orang dan organisasi.

### **2.3.2 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah (SIAP)**

Menurut Romney dan Steinbart (2018), Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah suatu sistem untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Pengertian tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian akuntansi yang diartikan sebagai proses identifikasi, pengumpulan, dan penyimpanan data untuk diproses dalam rangka pengembangan, pengukuran, serta komunikasi informasi. Akuntansi adalah sistem informasi, dalam hal ini, akuntansi merupakan bahasa dunia bisnis. Sementara itu, SIA merupakan kecerdasan atau alat penyedia informasi dari bahasa tersebut.

Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah (SIAP) merupakan suatu sistem terintegrasi yang mencakup komponen/elemen yang merupakan kumpulan dari peralatan dan manusia sebagai sumber daya dari suatu organisasi pemerintah untuk melakukan pengolahan data yaitu mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data/peristiwa terkait keuangan pemerintah untuk menghasilkan informasi bagi pengguna/*stakeholders* dalam rangka pengambilan keputusan

organisasi. Sederhananya, SIAP merupakan SIA dalam versi pemerintahan. SIAP mendukung sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) yang mengusung integrasi dari proses bisnis suatu sistem yang terdiri dari berbagai modul. Dalam pemerintahan sekarang, salah satu sistem aplikasi yang mengimplementasikan hal tersebut adalah SAKTI yang wajib diselenggarakan oleh seluruh K/L. Di samping itu, terdapat aplikasi SPAN yang dioperasikan oleh Kemenkeu. Pengoperasian kedua aplikasi tersebut merupakan wujud interkoneksi data keuangan pemerintah antara PA dan BUN.

Romney dan Steinbart (2018) menerangkan bahwa SIA setidaknya memiliki enam komponen. Enam komponen SIA kemudian juga menjadi komponen dari SIAP. Keenam komponen SIAP adalah sebagai berikut.

a. Orang

Komponen pertama adalah orang yang menggunakan sistem. Contohnya adalah pejabat perbendaharaan yang merupakan pengguna SAKTI. Hak akses pada SAKTI juga dibagi sesuai kewenangannya seperti administrator, operator, validator, dan *approver*.

b. Prosedur dan Instruksi

Komponen kedua adalah prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Contohnya adalah peraturan, proses bisnis, dan manual aplikasi terkait SAKTI.

c. Data

Komponen ketiga adalah data tentang organisasi dan aktivitas bisnis. Contohnya adalah dokumen maupun ADK pada SAKTI. Dokumen maupun

ADK tersebut seperti ADK pagu, kontrak, SPP, SPM, BAST, dan Bukti Penerimaan Negara (BPN).

d. Perangkat Lunak (*Software*)

Komponen keempat adalah *Software* yang digunakan untuk memproses data. Contohnya adalah SAKTI itu sendiri dan SPAN.

e. Infrastruktur Teknologi Informasi (TI)

Komponen kelima adalah infrastruktur teknologi informasi yang terdiri dari komputer, *peripheral devices*, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam SIAP. Komputer yang dimaksud termasuk server. *Peripheral devices* yang dimaksud seperti *barcode scanner*. Jaringan komunikasi yang dimaksud seperti intranet Kemenkeu dan perangkat interkoneksi dengan perbankan/pihak lain.

f. Pengendalian Intern dan Keamanan.

Komponen keenam adalah pengendalian intern dan keamanan untuk mengamankan data SIAP. Contohnya dalam praktik seperti pengaturan *role user*, pengujian tagihan, validasi data, enkripsi data, tanda tangan elektronik, *biometric*, dan *one-time password*.

Apabila membandingkan antara pengertian SIAP dan SAPP, keduanya memiliki pengertian yang secara substansial sama. Hal ini sejalan dengan ungkapan Anwar dan Hadi (2022) bahwa istilah SIAP dalam Pemerintah Pusat lebih dikenal sebagai SAPP. Data akuntansi pemerintah, sistem informasi, dan proses bisnis ada di dalam SIAP. Oleh sebab itu, SIAP berperan penting dan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama untuk mengumpulkan dan menyimpan

data mengenai aktivitas, sumber data, serta personil organisasi. Yang kedua untuk mengolah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, mengevaluasi aktivitas, sumber daya, dan personil. Yang ketiga untuk memberikan pengendalian yang memadai dalam rangka mengamankan aset dan data organisasi. Selain itu, SIAP yang telah diimplementasikan dengan baik dapat menambah nilai organisasi seperti meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk maupun jasa, meningkatkan efisiensi, menambah berbagai pengetahuan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan/layanan, meningkatkan struktur pengendalian intern, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

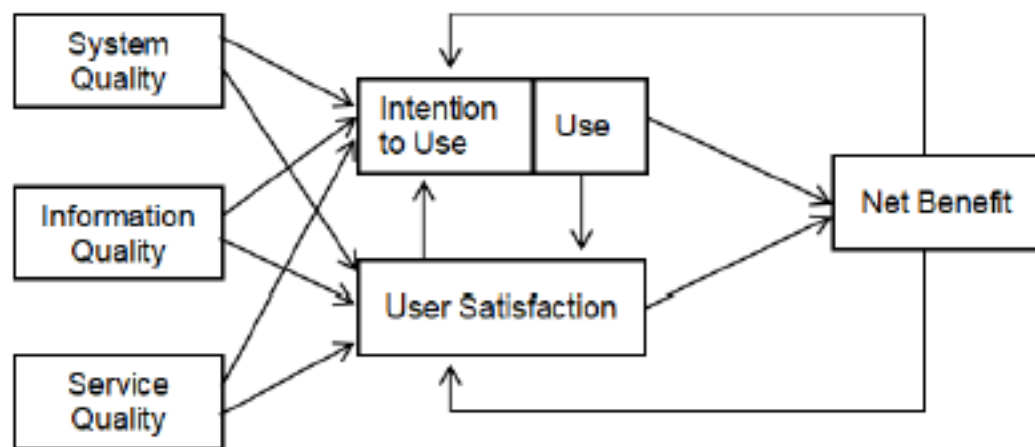
### **2.3.3 Model Kesuksesan Sistem Informasi Menurut DeLone dan McLean**

Menurut Fitriani *et al.* (2023), sistem informasi yang baik sejatinya dibangun dan dikembangkan di atas kebutuhan pengguna. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap sistem informasi dapat dilakukan melalui penilaian terhadap suatu ukuran yaitu pengalaman pengguna selama mengoperasikan sistem informasi tersebut. Hadi (2022) menerangkan jika implementasi sebuah aplikasi perlu dievaluasi untuk menjaga dan meningkatkan kinerja aplikasi tersebut agar tetap dapat memberikan nilai manfaat bagi pengguna.

Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem informasi. Model tersebut dikemukakan oleh DeLone dan McLean pada tahun 1992. Pada tahun 2003, DeLone dan McLean memperbarui model tersebut sehingga disebut juga

dengan *Updated DeLone and McLean Information System Success Model (ISSM)*. Berdasarkan pembaharuan tersebut, terdapat enam variabel pengukuran dalam Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean yang saling berkaitan satu sama sama lain. Keenam variabel tersebut dapat dilihat pada gambar ilustrasi berikut.

Gambar II.3 *Updated DeLone and McLean ISSM*



Sumber: (DeLone & McLean, 2003) dalam (Petter *et al.*, 2008)

Tiga variabel pertama tentang kualitas yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan. Ketiganya saling memengaruhi dua variabel berikutnya yaitu penggunaan atau minat penggunaan dan kepuasan pengguna. Kemudian, keduanya saling memengaruhi secara resiprokal dan menjadi antecedent dari manfaat bersih (Pambudi & Adam, 2018).

Manfaat bersih yang menjadi titik akhir penilaian merupakan penyatuan dari dimensi *individual impact* dan *organizational impact* sebagaimana dikemukakan oleh DeLone dan McLean dalam pembaharuan modelnya pada tahun 2003. Selain

itu, penambahan variabel kualitas layanan dan pemberian alternatif variabel minat penggunaan merupakan bentuk jawaban dari berbagai masukan atas Model Kesuksesan DeLone dan McLean versi tahun 1992. Variabel penggunaan dianggap kurang cocok dalam suatu model kausal. Kondisi umum ketika variabel penggunaan dianggap kurang cocok digunakan adalah ketika sistem informasi yang dinilai atau dievaluasi bersifat *mandatory*. Dalam hal ini, SAKTI merupakan sistem informasi yang bersifat *mandatory*, artinya SAKTI wajib diimplementasikan oleh seluruh K/L berdasarkan payung hukum formal melalui PMK. Berdasarkan beberapa penelitian sebagaimana disebutkan dalam Amriani dan Iskandar (2019), pengujian terhadap variabel penggunaan pada sistem informasi yang bersifat *mandatory* sering kali menunjukkan hasil yang tidak konsisten karena tidak dapat mencerminkan reaksi pengguna secara tepat dan hanya memberikan sedikit informasi mengenai kesuksesan sistem informasi yang dimaksud. Oleh sebab itu, variabel minat penggunaan dapat digunakan sebagai solusi alternatif pada beberapa konteks tertentu jika terdapat kesulitan dalam menafsirkan aspek-aspek multidimensi dari variabel penggunaan. Hal ini karena variabel minat penggunaan merupakan suatu sikap (*attitude*) bukan suatu tingkah laku (*behavior*).

### **2.3.4 Variabel dan Indikator Pengukuran Model Kesuksesan Sistem**

#### **Informasi DeLone dan McLean**

Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean terdiri dari enam variabel. Keenam variabel tersebut saling terkait hingga menghasilkan sebuah

nilai manfaat dari sistem informasi yang dievaluasi. Penjelasan mengenai keenam variabel tersebut adalah sebagai berikut.

a. Kualitas Sistem (*System Quality*)

Menurut DeLone dan McLean (1992) dalam Sihotang (2020), kualitas sistem menjadi penting untuk diukur guna mengetahui kepuasan pengguna. Kualitas sistem merupakan ukuran dari sistem itu sendiri, dan menjadi aspek yang diharapkan dari sistem. Pengguna mengharapkan sistem yang mudah digunakan serta cepat sehingga membantu menyelesaikan pekerjaan dengan efisien dan tepat waktu.

b. Kualitas Informasi (*Information Quality*)

Menurut Susanto (2013) dalam Sihotang (2020), kualitas informasi adalah kualitas *output* berupa sebuah informasi yang merupakan produk akhir dari sistem informasi. Kualitas informasi menjadi aspek penilaian pengguna bagaimana nilai manfaat dari informasi yang dihasilkan. Informasi yang relevan menandakan bahwa informasi tersebut memiliki tingkat kepentingan tertentu sehingga memengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna.

c. Kualitas Layanan (*Service Quality*)

Menurut Parasuraman *et al.* (1991) dan Gronroos (1994) dalam Sihotang (2020), kualitas layanan terdiri dari dua aspek, yaitu aspek teknis dan aspek fungsional. Aspek teknis merupakan fungsi jasa yang diterima secara aktual oleh pengguna. Sementara aspek fungsional merupakan cara pandang bagaimana penyedia menyampaikan suatu layanan. Dengan demikian, kualitas layanan merupakan persepsi/reaksi pengguna atas jasa yang diterima dari

penyedia sistem informasi. Persepsi/reaksi tersebut akan memengaruhi pengalaman dan dapat memprediksi perilaku pengguna di masa depan. Oleh sebab itu, kualitas layanan dikatakan baik jika sesuai dengan ekspektasi pengguna agar dapat memenuhi kepuasannya dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kinerja organisasi.

d. Penggunaan atau Minat Penggunaan (*Use or Intention to Use*)

Menurut Petter *et al.* (2008), penggunaan merupakan tingkatan dan cara di mana pengguna memanfaatkan suatu sistem informasi. Penggunaan merupakan suatu tingkah laku (*behavior*), sementara minat penggunaan merupakan suatu sikap (*attitude*). Persepsi pengguna atas penggunaan suatu sistem informasi yang bernilai baik akan meningkatkan kepuasan pengguna. Kemudian, peningkatan kepuasan pengguna akan mengarah ke minat penggunaan yang lebih tinggi. Apabila minat penggunaan naik, selanjutnya akan kembali memengaruhi tingkat penggunaan.

e. Kepuasan Pengguna (*User Satisfaction*)

Menurut Doll *et al.* (1994) dalam Sihotang (2020), kepuasan pengguna akhir adalah sikap afektif seseorang terhadap suatu sistem informasi yang digunakannya. Kepuasan pengguna merupakan perasaan puas dari pihak yang menggunakan sistem informasi karena merasa sistem informasi tersebut telah membantu penyelesaian tugas/pekerjaannya sehingga bermanfaat juga bagi organisasi. Apabila pengguna merasa puas, akan menaikkan minat untuk kembali menggunakan sistem informasi tersebut.

f. Manfaat Bersih (*Net Benefit*)

Menurut At-tamimi dan Siregar (2021), manfaat bersih didefinisikan sebagai persepsi pengguna terhadap kemampuan SAKTI berkontribusi pada kinerja individu dalam bentuk peningkatan produktivitas, kemudahan dan kecepatan penyelesaian pekerjaan, peningkatan prestasi kerja, serta efektivitas pengambilan keputusan. Nilai manfaat bersih dapat dapat ditinjau dari kebermanfaatan bagi individu dan kebermanfaatan bagi organisasi. Tingkat penggunaan dan kepuasan pengguna berperan penting dalam menentukan nilai manfaat bersih yang kemudian memengaruhi kembali minat penggunaan serta kepuasan pengguna.

Dalam rangka mengevaluasi suatu sistem informasi, diperlukan indikator-indikator untuk menguji dan/atau menilai enam variabel pengukuran Model Kuseksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean. Beberapa indikator untuk pengujian setiap variabel yang dimaksud didasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut.

a. Variabel Kualitas Sistem

1. Mudah digunakan (Sedera *et al.*, 2004) dalam (Petter *et al.*, 2008).
2. Mudah dipelajari (Sedera *et al.*, 2004) dalam (Petter *et al.*, 2008).
3. Fitur-fitur (Sedera *et al.*, 2004) dalam (Petter *et al.*, 2008).
4. Fleksibilitas (Sedera *et al.*, 2004) dalam (Petter *et al.*, 2008).
5. Integrasi (Sedera *et al.*, 2004) dalam (Petter *et al.*, 2008).

b. Variabel Kualitas Informasi

1. Ketersediaan (Sedera *et al.*, 2004) dalam (Petter *et al.*, 2008).

2. Kegunaan (Sedera *et al.*, 2004) dalam (Petter *et al.*, 2008).
  3. Mudah dipahami (Sedera *et al.*, 2004) dalam (Petter *et al.*, 2008).
  4. Relevansi (Sedera *et al.*, 2004) dalam (Petter *et al.*, 2008).
  5. *Conciseness* (Sedera *et al.*, 2004) dalam (Petter *et al.*, 2008).
- c. Variabel Kualitas Layanan
1. Keandalan (Petter *et al.*, 2008).
  2. Kepastian (Parasuraman *et al.*, 1988) dalam (At-tamimi & Siregar, 2021).
  3. Responsif (Gefen, 2000) dalam (Petter *et al.*, 2008).
  4. Kapabilitas (Yoon & Guimaraes, 1995) dalam (Petter *et al.*, 2008).
  5. Akurasi (Petter *et al.*, 2008).
- d. Variabel Penggunaan atau Minat Penggunaan
1. Frekuensi penggunaan (Petter *et al.*, 2008).
  2. Durasi penggunaan (Petter *et al.*, 2008).
  3. Struktur penggunaan (Burton-Jones & Straub, 2006) dalam (Petter *et al.*, 2008).
  4. Fungsi penggunaan (Burton-Jones & Straub, 2006) dalam (Petter *et al.*, 2008).
  5. Tujuan penggunaan (Petter *et al.*, 2008).
- e. Variabel Kepuasan Pengguna
1. Memenuhi kebutuhan (Seddon & Yip, 1992) dalam (Amriani & Iskandar, 2019).
  2. Kepuasan keseluruhan (Seddon & Yip, 1992) dalam (Amriani & Iskandar, 2019).

3. Senang (Aldholay *et al.*, 2018) dalam (Ladifani, 2022).
  4. Semangat (Kwahk *et al.*, 2018) dalam (Ladifani, 2022).
  5. Gembira (Kwahk *et al.*, 2018) dalam (Ladifani, 2022).
- f. Variabel Manfaat Bersih
1. Meningkatkan produktivitas (Torkzadeh & Doll, 1999) dalam (Petter *et al.*, 2008).
  2. Mendorong inovasi (Torkzadeh & Doll, 1999) dalam (Petter *et al.*, 2008).
  3. Mempermudah kontrol manajemen (Torkzadeh & Doll, 1999) dalam (Petter *et al.*, 2008).
  4. Efisiensi (Adams *et al.*, 1992) dalam (Petter *et al.*, 2008).
  5. Efektivitas (Petter *et al.*, 2008).

## 2.4 Penelitian-Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang evaluasi SAKTI sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Prabowo (2017) meneliti tentang faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan SAKTI oleh para pengguna dari 11 Satker di lingkungan Kanwil DJPb DKI Jakarta. Dengan metode kuantitatif menggunakan model TAM, diperoleh hasil bahwa faktor kemanfaatan dan kemudahan penggunaan dinilai dapat diterima oleh para pengguna SAKTI.

Penelitian-penelitian berikutnya menggunakan metode kuantitatif memanfaatkan model DeLone dan McLean. Pambudi dan Adam (2018) menganalisis tentang dimensi kesuksesan implementasi SAKTI pada Kanwil DJPb dan KPPN di Jawa Timur. Berdasarkan pengujian menggunakan lima

variabel pengukuran, diperoleh hasil bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Kemudian, kepuasan pengguna juga berpengaruh positif terhadap manfaat bersih. Namun, penelitian berikutnya yang juga menggunakan lima variabel pengukuran menunjukkan hasil berbeda dengan penelitian sebelumnya. Amriani dan Iskandar (2019) meneliti tentang tentang kesuksesan implementasi SAKTI pada Satker di lingkungan BPPK. Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa implementasi SAKTI tersebut belum bisa dikatakan sukses karena tidak semua hipotesis yang diajukan dapat diterima. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas sistem memengaruhi kepuasan pengguna dan kepuasan pengguna memengaruhi manfaat bersih. Sementara itu, kualitas informasi dan kualitas layanan tidak memengaruhi kepuasan pengguna.

Sihotang (2020) melakukan penelitian kepuasan pengguna SAKTI pada KPPN yang ada di Sumatera Utara dengan menggunakan empat variabel pengukuran. Pada penelitian tersebut, diperoleh simpulan jika implementasi SAKTI telah berjalan dengan sukses karena hasil pengujian menunjukkan terdapat efek positif dari kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan terhadap kepuasan pengguna dengan variabel kualitas layanan memiliki nilai tertinggi dibandingkan variabel-variabel yang lain. Meskipun demikian, penelitian berikutnya mendapatkan simpulan yang berbeda. Dengan menggunakan lima variabel pengukuran, At-tamimi dan Siregar (2021) meneliti tentang kesuksesan implementasi SAKTI *web full module* pada Kemensetneg. Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa persepsi pengguna berpengaruh positif pada

implementasi SAKTI. Hasil pengujian pada variabel pengukuran yang digunakan menunjukkan bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap manfaat bersih. Sementara itu, kualitas layanan justru tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna.

Hadi (2022) mengevaluasi tentang faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi SAKTI berdasarkan perspektif pengguna pada Satker di lingkungan sembilan K/L. Kesembilan K/L tersebut antara lain: Kemensetneg, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif memanfaatkan empat variabel pengukuran model DeLone dan McLean. Berdasarkan pengujian hipotesis yang diajukan, kualitas sistem dan kualitas informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna. Kemudian, kepuasan pengguna juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap manfaat bersih. Oleh sebab itu, peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan SAKTI jika ditinjau dari kualitas sistem dan kualitas informasi sudah berhasil berjalan dengan baik.